

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UN Women dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Afghanistan pada periode 2021-2024, yaitu sejak kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan. Kembalinya Taliban pada Agustus 2021 memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan perempuan Afghanistan, terutama melalui penerbitan lebih dari 70 dekrit yang secara sistematis membatasi hak-hak perempuan. Kondisi tersebut menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang secara resmi melarang anak perempuan dan perempuan muda mengakses pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Situasi ini juga menempatkan Afghanistan sebagai negara dengan tingkat kesenjangan gender terbesar kedua di dunia.

Setelah Taliban kembali berkuasa, perempuan Afghanistan mengalami pembatasan yang semakin ketat dalam berbagai aspek kehidupan. Pada Maret 2022, anak perempuan dilarang mengakses pendidikan tingkat menengah. Selanjutnya, pada Desember 2022 akses perempuan terhadap pendidikan tinggi juga ditanggguhkan, dan pada Januari 2023 perempuan dilarang mengikuti ujian masuk universitas. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menghilangkan hak pendidikan bagi sedikitnya 1,4 juta anak perempuan, tetapi juga mendorong meningkatnya angka pernikahan dini karena keluarga yang berada dalam tekanan ekonomi cenderung memilih menikahkan anak perempuan mereka. Di sisi lain, norma-norma patriarki yang telah lama berkembang dalam masyarakat Afghanistan bahkan sebelum Taliban kembali berkuasa turut memperkuat kondisi tersebut. Fakta bahwa hampir 30 persen anak perempuan di Afghanistan belum pernah mengenyam pendidikan dasar bahkan sebelum Taliban kembali berkuasa menunjukkan bahwa hambatan terhadap pendidikan perempuan tidak hanya disebabkan oleh kebijakan Taliban, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang telah lama terbentuk dalam masyarakat.

Jika dilihat melalui perspektif feminisme liberal menurut Jill Steans et al., (2010), kondisi tersebut mencerminkan bentuk diskriminasi gender struktural

yang membatasi hak dan kesempatan perempuan yang seharusnya dapat mereka peroleh. Jill Steans et al., (2010) menegaskan bahwa perempuan, sama seperti laki-laki, merupakan individu rasional yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik. Ketika Taliban secara sistematis mencabut hak-hak tersebut, tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan hak dan kesempatan, tetapi juga membatasi kemampuan perempuan Afghanistan dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh norma-norma patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat, sehingga diskriminasi gender tidak hanya berlangsung melalui kebijakan negara, tetapi juga melalui tekanan sosial dan budaya yang sulit untuk diubah.

Di tengah kondisi yang sangat represif tersebut, UN Women tidak menarik diri dari Afghanistan, tetapi melakukan penyesuaian strategi secara menyeluruh dengan tetap menjalankan mandatnya melalui tiga peran utama dalam kerangka Archer, (2001). Sebagai instrumen, UN Women memfasilitasi tekanan diplomatik kolektif lebih dari 40 negara melalui CEDAW serta mendorong adopsi Resolusi 2681 (2023) di Dewan Keamanan PBB. Selain itu, UN Women juga mendokumentasikan dampak kebijakan Taliban melalui lebih dari 70 dekrit yang kemudian menjadi rujukan bagi komunitas internasional. Sebagai arena, UN Women berupaya memastikan suara perempuan Afghanistan tetap terdengar di tingkat global melalui penerbitan tiga Gender Alert serta pelaksanaan mekanisme konsultasi triwulanan yang menjangkau 776 perempuan di 34 provinsi Afghanistan dalam satu siklus konsultasi. Sebagai aktor independen, UN Women bergerak langsung di tingkat komunitas melalui program Rebuilding the Women's Movement yang bekerja sama dengan 113 organisasi di 19 provinsi. Selain itu, UN Women juga mendukung Radio Femme yang menjangkau sekitar 60.000-70.000 pendengar serta Begum TV yang diakses oleh lebih dari 4.000 pelajar perempuan. Meskipun berbagai peran tersebut belum mengubah kebijakan Taliban secara langsung, UN Women berhasil mempertahankan ruang pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan serta memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di antara ketiga peran tersebut, peran sebagai aktor independen

menunjukkan peran yang paling dominan karena mampu memberikan dampak yang paling konkret dan dirasakan secara langsung oleh perempuan Afghanistan di tingkat individu. Hal ini sejalan dengan fokus feminisme liberal yang menekankan pemulihan hak dan kesempatan pada level tersebut.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan sehingga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Pertama, penelitian ini belum membahas secara mendalam kondisi psikologis perempuan Afghanistan yang terdampak larangan pendidikan, termasuk meningkatnya kasus depresi sebagaimana dilaporkan oleh narasumber di lapangan. Kedua, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam keterlibatan NGO internasional selain UN Women dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan di Afghanistan. Oleh karena itu, perbandingan mengenai efektivitas berbagai aktor internasional masih perlu diteliti lebih lanjut. Ketiga, dampak jangka panjang dari kebijakan larangan pendidikan Taliban terhadap generasi perempuan Afghanistan yang terdampak sejak tahun 2021 juga menjadi isu penting yang belum sepenuhnya dibahas dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi perempuan Afghanistan serta berbagai upaya dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam isu pemberdayaan perempuan dan hak pendidikan. Bagi pemerintah yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, sudah seharusnya untuk terus konsisten mendukung kesetaraan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan publik. Bagi komunitas internasional dan negara-negara donor, penelitian ini menegaskan pentingnya meningkatkan proporsi pendanaan bagi inisiatif kesetaraan gender di Afghanistan, dengan target minimal 30 persen dari total pendanaan sebagaimana direkomendasikan oleh UN Women. Bagi organisasi internasional seperti UN Women, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang dijalankan melalui jalur-jalur lokal cenderung lebih efektif dalam menghadapi rezim otoriter dibandingkan pendekatan diplomatik yang bersifat konfrontatif.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa kemajuan hak pendidikan perempuan tidak dapat hanya bergantung pada tekanan internasional, tetapi juga harus disertai dengan perubahan sosial yang menyeluruh di tingkat masyarakat. Hal ini karena kemajuan yang tidak didasarkan pada transformasi sosial yang kuat terbukti rentan dan dapat kembali runtuh sewaktu-waktu, sebagaimana yang terjadi di Afghanistan setelah Agustus 2021.